

Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dan Penerima Insentif Daerah Kabupaten Bojonegoro

Heni Novi Wijaya Kusumawati¹, Ertien Rining Nawangsari²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: heninoviwijayakusumawati@gmail.com,

ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

The implementation of the Employment Social Security Program in Bojonegoro Regency aims to provide social protection for vulnerable workers and recipients of regional incentives. This study uses qualitative methods such as interviews, surveys, and documentation to analyze the implementation of the program and the obstacles encountered. The results show that this program has been quite effective, with significant budget support from the regional budget, but there are still challenges in communication, resource management, and administration. Inclusive and structured communication aspects have not fully pursued community participation, especially in reporting participant deaths. Participant data management still relies on manual methods, which have the potential to cause inefficiencies. Although the disposition of the implementers at BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro shows high motivation and commitment to social protection, dependence on complex bureaucratic procedures hinders access for workers with low literacy. To improve effectiveness, it is necessary to strengthen the capacity of village officials, integrate and digitize data, and simplify administrative procedures.

Keywords: Social Security, BPJS Ketenagakerjaan, Vulnerable Workers

ABSTRAK

Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan penerima insentif daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, survei, dan dokumentasi untuk menganalisis pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa program ini telah berjalan cukup efektif, dengan dukungan anggaran yang signifikan dari APBD, namun masih ada tantangan dalam komunikasi, pengelolaan sumber daya, dan administrasi. Aspek komunikasi yang inklusif dan terstruktur belum sepenuhnya mengejar partisipasi masyarakat, terutama dalam pelaporan kematian peserta. Pengelolaan data peserta masih bergantung pada metode manual, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi. Meskipun disposisi pelaksana di BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro menunjukkan motivasi tinggi dan komitmen terhadap perlindungan sosial, ketergantungan pada prosedur birokrasi yang kompleks menghambat akses bagi pekerja rendah literasi. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan kapasitas aparat desa, integrasi dan digitalisasi data, serta penyederhanaan prosedur administrasi.

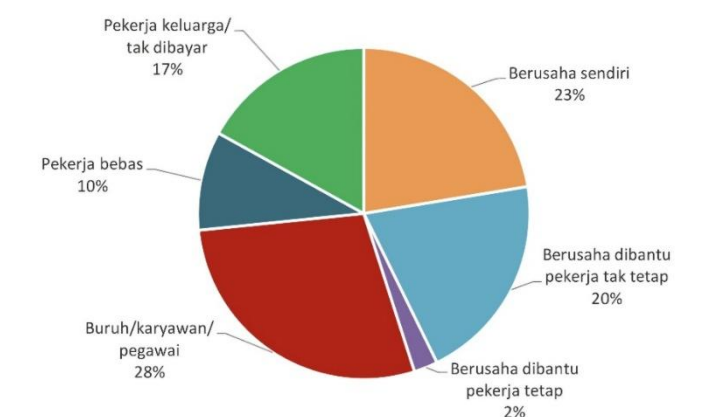
Kata Kunci: Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Rentan

PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan global yang mendapat perhatian serius dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pada Tujuan 1 yang menekankan penghapusan kemiskinan. Di Indonesia, permasalahan kemiskinan ekstrem bersifat struktural dan masih banyak dijumpai, terutama di wilayah pedesaan. Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut, yang ditandai dengan ketimpangan sosial serta tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan pekerjaan informal yang rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan perlindungan sosial serta ekonomi kepada tenaga kerjadengan pelaksanaannya menggunakan sistem asuransi (Khofifah dkk., 2023). Ketentuan mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Selain itu, jaminan sosial juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." (Sihombing & Ritonga, 2024)

Berdasarkan laporan (Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro Agustus 2025 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2025) penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utamanya dibedakan ke dalam sektor formal dan informal. Kelompok pekerja formal meliputi mereka yang berstatus berusaha dengan bantuan buruh tetap atau buruh dibayar serta buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, penduduk yang bekerja secara informal mencakup individu yang berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tanpa upah.



Gambar 1: Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2025

Sumber: Data BPS

Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro memiliki urgensi yang tinggi mengingat besarnya jumlah pekerja yang berada dalam kondisi rentan. Data menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bojonegoro yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 69,35 persen, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 30,65 persen (Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro Agustus 2025 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat bekerja tanpa perlindungan sosial yang memadai, menghadapi ketidakpastian pendapatan, serta memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap risiko sosial dan ekonomi. Kelompok pekerja rentan, termasuk penerima insentif daerah dan tenaga kerja sektor informal, merupakan kelompok yang paling membutuhkan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyediaan perlindungan sosial bagi kelompok ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan dukungan anggaran yang cukup besar dan melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi serta pemantauan di lapangan untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan warga, terutama masyarakat kurang mampu. Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan dana sebesar Rp35,903 miliar untuk mendaftarkan masyarakat miskin dan pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, total klaim mencapai Rp8,73 miliar. Program santunan duka yang kini dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan dinilai semakin memberi manfaat yang besar bagi masyarakat (Khoirudin, 2025). Program ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, mengingat bahwa perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta manfaat lainnya dapat berfungsi sebagai penopang bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan ekonomi dan berpotensi kehilangan sumber penghasilan akibat kecelakaan kerja atau peristiwa yang tidak terduga. Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan, yang diungkapkan dalam (Khoirudin, 2025) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mendaftarkan sebanyak 157.058 pekerja rentan sebagai peserta. Kelompok ini mencakup pekerja lepas atau serabutan, pengemudi ojek, tukang becak, nelayan darat, penambang perahu, serta buruh tani dan buruh tembakau, buruh ternak, penggali atau penjaga makam, hingga pekerja mandiri penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat 35.688 penerima insentif daerah yang terdiri atas ketua RT/RW, anggota satuan perlindungan masyarakat, marbot, modin wanita, takmir masjid, guru ngaji, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kader desa.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, seperti yang disampaikan oleh (Andriyanto dkk., 2025) mengungkapkan tantangan signifikan dalam implementasi program jaminan sosial di Kota Semarang, termasuk rendahnya tingkat kepesertaan pekerja rentan yang hanya mencapai 15% akibat ketiadaan regulasi daerah yang spesifik dan prosedur pendaftaran yang rumit. Penelitian ini mengadopsi pendekatan socio-legal dan menekankan perlunya Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti faktor-faktor luas yang menghambat perlindungan untuk pekerja rentan, penelitian ini akan memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana aspek-aspek praktis dari implementasi di Kabupaten Bojonegoro berpengaruh terhadap efektivitas jaminan sosial, serta mengevaluasi program insentif daerah yang ada. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif untuk meningkatkan program jaminan sosial di daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro. Wawancara dilaksanakan untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber, antara lain tim kepesertaan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Sementara itu, survei digunakan untuk memperoleh data dari pekerja rentan dan penerima insentif daerah yang terdaftar sebagai peserta program. Studi dokumentasi dilakukan sebagai data pendukung melalui penelaahan terhadap dokumen resmi, laporan kegiatan, dan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan mengacu pada variabel dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di Kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja di Indonesia (Gurusinga & Sujianto, 2023). Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan penerima insentif daerah di Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi maupun risiko kerja yang tinggi. Melalui pendanaan APBD, pemerintah memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa kelompok pekerja rentan memperoleh

perlindungan minimum atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan dasar seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk menilai efektivitas implementasi program tersebut, analisis ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat aspek fundamental, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Seluruh analisis diperkuat dengan temuan lapangan dan wawancara mendalam bersama Drajat Aji, perwakilan Tim Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, yang memberikan informasi empiris mengenai mekanisme pelaksanaan program.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III, karena kualitas transmisi, kejelasan pesan, serta konsistensi komunikasi menentukan sejauh mana kebijakan dipahami dan dijalankan oleh para pelaksana maupun penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drajat Aji, diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilakukan melalui mekanisme yang cukup sistematis. Setiap tahun dilaksanakan dua kali kegiatan verifikasi dan validasi (verval) di tingkat kecamatan, yang menjadi forum utama untuk mensosialisasikan informasi terkait kepesertaan, kriteria sasaran, serta mekanisme pelaporan perubahan data. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan camat, kepala desa, operator desa, serta perwakilan masyarakat dari berbagai titik.



Gambar 2: Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dan Penerima Insentif Daerah di Kecamatan Dander

Sumber: Dokumentasi Penulis

Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat secara merata. Dengan pola komunikasi tersebut, pelaksana menilai bahwa penyampaian informasi secara formal sudah merata di seluruh desa dan kecamatan di Bojonegoro. Pelaksana menjelaskan bahwa pekerja rentan merupakan individu yang masuk dalam data kemiskinan daerah (DAMISDA), sedangkan penerima insentif merupakan pekerja dengan honorarium bulanan seperti RT, RW, modin, marbot, BPD, dan LINMAS.

Meskipun secara struktural penyampaian informasi sudah merata, terdapat kendala pada tingkat akar rumput. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kelancaran komunikasi dari pihak desa kepada peserta seperti pada tahap pelaporan data, khususnya terkait pelaporan kematian peserta. Misalnya, ketika ada peserta yang meninggal dunia tetapi keluarga tidak segera melapor, proses pengajuan santunan menjadi sangat terlambat. Pelaksana memberikan contoh kasus peserta yang meninggal di bulan Januari namun baru dilaporkan pada bulan September, sehingga proses klaim tertunda karena laporan yang tidak real-time. Selain itu, kendala administratif di tingkat desa dan Dukcapil, seperti keterlambatan penerbitan KTP baru, akta kematian, atau surat keterangan ahli waris, turut memperlambat penyampaian data mutasi peserta. Terjadinya keterlambatan dalam pelaporan dari tingkat desa menyebabkan adanya penundaan dalam pembayaran santunan, yang berimplikasi pada ketidakpastian hak peserta.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pelaksana di tingkat desa belum optimal dan tidak berjalan secara real time, bertentangan dengan prinsip komunikasi yang efektif sebagaimana dijabarkan dalam teori Edward III. Dari pengamatan, meski sosialisasi telah dilakukan dengan inklusif, masih diperlukan perbaikan dalam mekanisme pelaporan serta umpan balik. Penguatan kapasitas bagi operator desa serta integrasi data dengan Dukcapil adalah langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mempercepat dan memastikan keakuratan pembaruan status peserta. Dengan peningkatan pada dimensi komunikasi, khususnya di sektor umpan balik dan pemutakhiran data, efektivitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro dapat ditingkatkan, sehingga manfaat dapat dirasakan oleh pekerja rentan dan penerima insentif secara tepat waktu.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Bojonegoro, keandalan sistem aplikasi dan database dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat krusial, mengingat jumlah peserta yang besar. Menurut Drajat Aji dari tim kepesertaan, pengelolaan data peserta telah dipersiapkan dengan melakukan pemetaan dana yang dialokasikan untuk satu tahun, sehingga kapasitas penampungan data sesuai dengan anggaran yang ada. Sebagai contoh, dana awal yang dialokasikan adalah Rp170.000 per peserta, yang kemudian ditambah menjadi Rp50.000, namun alokasi ini sudah ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun sehingga tidak bisa ditambah atau dikurangi secara signifikan. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan sumber daya finansial yang secara langsung mempengaruhi skala dan kecepatan proses input data secara massal.

Selain itu, aparat desa yang terlibat dalam pendataan memiliki jumlah pegawai dan insentif yang telah dianggarkan dan diatur selama setahun, sehingga tidak terjadi kekurangan signifikan dalam dukungan tenaga untuk input data. Namun, tantangan muncul terkait dengan teknis pengolahan data peserta dalam jumlah yang besar. Tim menggunakan metode sortir dan verifikasi secara verbal yang ketat untuk menyeleksi data sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Dari jumlah awal yang mencapai sekitar satu juta data, proses penyaringan meliputi

validasi kriteria usia maksimal 65 tahun, status pekerjaan (menyaring PNS, Polri, atau pekerja yang tidak memenuhi kualifikasi), serta keabsahan dan domisili data peserta yang berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seleksi ini penting untuk memastikan akurasi data peserta yang masuk sesuai dengan anggaran dan kebijakan program.

Pendekatan sortir manual yang intensif ini menunjukkan adanya keterbatasan kapabilitas sistem aplikasi dalam mengotomatiskan proses pemfilteran data massal. Oleh karena itu, kendala utama yang dihadapi bukan pada kapasitas penyimpanan data, tetapi pada verifikasi kualitas data dan kesesuaian peserta dengan kriteria program. Meskipun sistem aplikasi BPJS Ketenagakerjaan mampu menampung data dalam jumlah besar selama dana dan sumber daya manusia yang mendukung tersedia, proses input data secara massal memerlukan penguatan dalam pengelolaan sumber daya agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks dimensi sumber daya Edward III, studi ini menunjukkan bahwa aspek anggaran dan sumber daya manusia terpenuhi dengan baik. Namun, terdapat tantangan dalam mekanisme verifikasi data yang masih sangat tergantung pada proses manual dan prosedur penyaringan ketat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pada kapabilitas sistem aplikasi agar dapat lebih baik mengakomodasi data peserta tanpa mengorbankan kualitas verifikasi yang diperlukan.

3. Disposisi

Studi ini menunjukkan bahwa tim di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro memiliki motivasi yang kuat yang mendasari pelaksanaan tugas mereka. Menurut teori Edward III, dimensi disposisi mencakup sikap, motivasi, dan persepsi individu yang memengaruhi kinerja organisasi. Dalam konteks ini, tim menganggap tugas mereka sebagai lebih dari sekadar kewajiban; mereka melihatnya sebagai komponen penting dalam menyediakan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarga mereka.

Motivasi tim berakar pada pemahaman yang mendalam tentang pentingnya program jaminan sosial, yang tidak hanya menawarkan perlindungan finansial, tetapi juga berpotensi untuk mengurangi dampak negatif dari kehilangan pencari nafkah. Meskipun santunan mungkin tidak sepenuhnya menggantikan kerugian yang dialami, manfaat yang ditawarkan dapat berfungsi untuk meringankan beban ekonomi dengan memberikan dukungan untuk pendidikan dan usaha bagi ahli waris.

Tanggung jawab sosial yang diinternalisasi oleh tim menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan program. Disposisi positif ini menciptakan lingkungan yang mendorong kesadaran dan kesiapan untuk melaksanakan program dengan baik. Sejalan dengan itu, dimensi disposisi menjelaskan bahwa motivasi dan kesiapan individu sangat terpengaruh oleh nilai-nilai sosial dan personal yang mereka anut, yang berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program jaminan sosial di tingkat lokal.

4. Struktur Birokrasi

Studi ini mengkaji dimensi struktur birokrasi dalam kerangka teori Edward III, yang menjelaskan pengaruh aturan dan prosedur terhadap keberhasilan

pelaksanaan program. Melalui wawancara dengan tim kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa prosedur pencairan santunan untuk pekerja rentan yang mengalami kehilangan atau kecelakaan dinyatakan dengan jelas dalam serangkaian persyaratan administratif yang harus dipenuhi, antara lain KTP, surat keterangan ahli waris, akta kematian, dan bukti nikah.

Meskipun prosedur ini telah dirancang untuk memastikan aspek legalitas dan transparansi, kurangnya jalur afirmatif yang memfasilitasi akses bagi pekerja rentan dengan latar belakang pendidikan rendah dapat menjadi penghalang. Tim kepesertaan menunjukkan inisiatif dengan memberikan dukungan langsung kepada ahli waris yang mengalami kesulitan administrasi, termasuk membolehkan penggunaan cap jempol sebagai alternatif tanda tangan. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam prosedur birokrasi yang tetap mempertahankan standar administratif.

BPJS Ketenagakerjaan menjalankan sistem birokrasi berdasarkan Service Level Agreement (SLA), yang menetapkan batas waktu pembayaran santunan selama tiga hari setelah berkas lengkap dikumpulkan. Mekanisme tersebut berfungsi untuk mempercepat proses, meskipun kendala administratif di tingkat desa, seperti keterlambatan dalam penerbitan surat keterangan ahli waris, dapat menghambat penyaluran santunan.

Koordinasi yang baik antara BPJS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendukung kelancaran proses pembayaran, namun masih ada usulan untuk memperluas kuota penerima santunan guna mencapai cakupan yang lebih inklusif bagi pekerja rentan di luar kategori miskin ekstrem. Secara keseluruhan, penerapan aturan dan prosedur yang ketat, tetapi responsif terhadap kebutuhan pekerja rentan, terbukti menjadi faktor kunci untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis menggunakan teori Edward III dan wawancara dengan pelaksana teknis, implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan penerima insentif daerah di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan cukup efektif namun masih menghadapi beberapa tantangan. Aspek komunikasi sudah terstruktur dengan baik melalui sosialisasi formal, tetapi masih terhambat oleh keterlambatan pelaporan di tingkat desa. Aspek sumber daya menghadapi kendala pada keterbatasan anggaran dan kualitas data awal. Disposisi pelaksana di tingkat BPJS sangat positif dan mendukung keberhasilan program, tetapi tidak selalu diimbangi oleh kesiapan pelaksana di tingkat desa. Struktur birokrasi secara umum berjalan efektif, transparan, dan bebas dari praktik diskriminatif. Ke depan, keberhasilan program dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas desa, integrasi data lintas instansi, penguatan pelaporan real-time, dan perluasan kuota peserta sesuai kebutuhan di lapangan.

SIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dan penerima insentif daerah di Kabupaten Bojonegoro

berjalan cukup baik secara keseluruhan. Meski begitu, ada sejumlah hambatan yang perlu segera diatasi agar bisa mencapai perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan ekstrem secara maksimal. Program ini berhasil memberikan jaminan perlindungan dasar melalui skema JKK dan JKM yang didanai oleh anggaran daerah; namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh aspek komunikasi, manajemen sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi lokal.

(1) Komunikasi, Dari sisi komunikasi, mekanisme sosialisasi dan verifikasi-validasi yang dilakukan secara berkala di tingkat kecamatan dan desa menunjukkan adanya pola komunikasi formal yang cukup terstruktur dan inklusif. Namun, keterlambatan pelaporan peristiwa penting seperti kematian peserta, lemahnya umpan balik, serta kendala administrasi di desa dan Dukcapil menimbulkan penundaan klaim dan mengurangi kepastian hak peserta, sehingga dimensi komunikasi menurut Edward III belum sepenuhnya terpenuhi. (2) Sumber daya, Dari sisi anggaran dan ketersediaan SDM, program relatif didukung oleh sumber daya yang memadai sesuai kapasitas APBD dan struktur pelaksana yang ada. Meski demikian, pengelolaan data peserta masih sangat bergantung pada proses sortir dan verifikasi manual dalam skala besar, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi, keterlambatan, dan risiko kesalahan dalam penetapan kepesertaan. (3) Disposisi, Tim pelaksana di BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro menunjukkan motivasi tinggi, kesadaran sosial, serta komitmen kuat untuk memastikan peserta dan ahli waris memperoleh haknya, yang menjadi modal penting dalam keberhasilan implementasi. Orientasi pelayanan yang tidak hanya administratif tetapi juga berperspektif perlindungan keluarga pekerja menjadikan disposisi pelaksana selaras dengan tujuan normatif kebijakan jaminan sosial. (4) Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi dan prosedur pencairan santunan telah diatur melalui standar waktu layanan (SLA) dan persyaratan administratif yang jelas, sehingga secara normatif memberikan kepastian dan akuntabilitas. Akan tetapi, kompleksitas dokumen yang harus dipenuhi, serta ketergantungan pada proses administrasi di desa, berpotensi menghambat akses bagi pekerja rentan dengan kapasitas literasi yang terbatas, sehingga dibutuhkan jalur afirmatif dan penyederhanaan prosedur tanpa mengurangi legalitas. Jika dianalisis menggunakan kerangka George C. Edward III, implementasi program dapat dinilai cukup efektif karena ditopang oleh struktur birokrasi yang jelas, dukungan anggaran, dan disposisi pelaksana yang positif, tetapi masih tereduksi oleh kelemahan dalam komunikasi dan pengelolaan data. Peningkatan efektivitas ke depan memerlukan penguatan kapasitas aparatur desa, integrasi dan digitalisasi data lintas instansi, mekanisme pelaporan real-time, serta perluasan cakupan peserta agar perlindungan menjangkau lebih banyak pekerja rentan di luar kategori miskin ekstrem.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, M. N. (2025). Efektivitas Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Buruh Bukan Penerima Upah (Studi Kasus Sektor Informal Kota Jogja).
- Andriyanto, Y., Haruman, W., & Pujiastuti, E. (2025). Kebijakan Daerah Dalam Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan Local Policy Roles in Protecting

- Social Security for Vulnerable Workers. *Journal Juridisch*, 3(3), 2621–4105.
<https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12051>
- Ardianingsih, A., Langelo, J. S., & Wicaksono, P. (2021). ANALISIS KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA PEKALONGAN. *JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN*, 19(2).
- Fatkhurrohman, M., & Pamungkas, N. L. (2025). Kanalisasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer di Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 3(1), 48–67.
<https://doi.org/10.61626/jamsostek.v3i1.106>
- Gurusinga, M. O., & Sujianto. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA PENGEMUDI OJEK ONLINE DI KOTA PEKANBARU. *Cross-border*, 6(1), 305–314.
- Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro Agustus 2025 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2025).
<https://bojonegorokab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/28/66/keadaan-ketenagakerjaan-kabupaten-bojonegoro-agustus-2025.html>
- Khofifah, N., Bakhri, S., & Wahyudi, I. (2023). PERAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA MENDATANG PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN. *JIEB: JURNAL ILMIAH EKONOMI BISNIS*, 9(3), 327–334.
<http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>
- Khoirudin, M. (2025, Mei 26). Situs Resmi Pemkab Bojonegoro.
<https://bojonegorokab.go.id/berita/8505/langkah-nyata-pemkab-bojonegoro-anggarkan-rp-35905-miliar-untuk-daftarkan-warga-miskin-ke-bpjs-ketenagakerjaan>
- Kuncoro, P. H., Wulansari, C., & Shobikin. (2025). Optimalisasi Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Pekerja BPU di Surabaya. *JURNAL JIHAPENMAS Jurnal Hilirisasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 38–43. <https://doi.org/10.29062/jihapenmas.v2i1.1149>
- Laratmase, A. J., Suhendar, B., Kurniatha, A., Darma, A. S., Kiatin, D. R., & Rakian, J. M. (2025). Literasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perkantoran DKI Jakarta. *IJEEM - Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 10(2), 20–28.
<https://doi.org/10.21009/ijeem.v10i2.59046>
- Putri, P. D. S., P., K. W. S. P., & Lasmi, N. W. (2024). Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal: Studi Pengabdian di Kabupaten Bangli. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(3), 3632–3639.
- Sihombing, I. L., & Ritonga, F. U. (2024). Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 322–327.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3883>
- Sutrisno, H. (2020). PENGARUH BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1).